



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:  Bangka Pos  Babel Pos  
 Babel News  Radar Bangka  
 Rakyat Pos  Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		✓													

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓																								

## PORWIL RUGIKAN NEGARA RP 1M

### ► Bukti Pertanggung jawaban Tak Jelas

**BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti tiga item dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangka Belitung (Babel). Termasuk salah satunya, penggunaan dana hibah Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) IX se Sumatera tahun 2015 lalu diduga merugikan negara Rp 1 miliar.**

**D**IDUGA penyalangan. Sebab, dalam audit penggunaan dana yang dilakukan BPKP terhadap hibah yang tidak dapat bukti pertanggung jawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu terdapat praktik belum didukung dengan peminjaman perusahaan bukti pertanggung jawaban.

Baca | Porwil ... | Hal 2





# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak:  Bangka Pos  Babel Pos  
 Babel News  Radar Bangka  
 Rakyat Pos  Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		✓													

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
✓																							

## Porwil ...

oleh penyedia jasa dan PPK untuk kegiatan Porwil IX tahun 2015 lalu.

Hal ini terungkap setelah Auditor Umum Keuangan Negara (Tartoma) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr Bambang Pamungkas MBA, membacakan hasil audit laporan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada saat Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (18/7) kemarin.

"Terdapat penggunaan anggaran dana hibah untuk kegiatan Porwil IX yang tidak didukung dengan alat bukti dan tidak dapat diyakini kewajarannya," ujar Bambang.

Diduga besaran dana hibah yang menjadi temuan BPK, sehingga disinyalir merugikan negara diperkirakan mencapai Rp 1 M. Sehingga, BPK meminta agar pemerintah dapat segera menyelesaikan laporan keuangan paling lambat 60 hari kedepan. "Disini terdapat praktik peminjaman perusahaan oleh penyedia jasa dan oleh PPK untuk kegiatan Porwil IX 2015 lalu," katanya.

Selain itu, BPK juga menyoroti penggunaan aset tetap gedung dan bangunan dicatat secara gabungan seperti didalamnya terdapat aset berupa peralatan dan mesin yang tidak dapat dipisahkan per jenis asetnya. "Selain itu aset-aset lain berupa aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya belum ditetapkan status. Hal tersebut berdampak pada

kewajaran nilai akumulasi dan beban penyusutan," tegas Bambang.

Lemahnya sistem pengendalian internal pada bendahara pengeluaran, pada PPKD dan BUD dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran kas yang belum dapat dipertanggungjawabkan. "Maka itu secara khusus pengelola yang harus memperbaiki atau meningkatkan pengendalian atas kas di bendahara, pengeluaran diantaranya tidak mencairkan SP2D UP tahun anggaran berikutnya, sebelum sisa kas di bendahara pengeluaran dikembalikan ke kas daerah, memverifikasi dan meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti bukti pengeluaran," ujar Bambang.

Diterangkan Bambang, hasil dari temuan tersebut secara lengkap telah dimuat dalam buku II LJP atas sistem pengendalian intern dan buku III LPH atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 20 undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. "Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampi-

kan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ungkap Bambang, seraya menambahkan jika BPK tidak boleh membantu dalam hanya memberikan rekomendasi kecuali teman-teman di BPKP.

Terkait hal ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi akan segera meminta dinas terkait untuk segera mengembalikan uang menjadi temuan BPK senilai lebih kurang Rp 1 M. "Agar dikembalikan sisa uang, namun mereka berkilah masih ingin membangun secara langsung, namun itu tidak ranahnya. Maka itu, kami minta mereka mengembalikan uang itu senilai Rp 1 M, dan kepala dinas sudah kita panggil," kata Rustam.

Sementara saat disingung mengenai aset Pemprov yang juga menjadi temuan tim audit BPK, orang nomor satu di Bumi Serumpun Sebalai ini mengungkapkan jika terdapat sedikitnya 100 aset yang belum bisa dibuktikan. "Syarat oleh BPK untuk dimulai sejak dini sehingga ada waktu untuk melakukan perbaikan. Kemudian waktunya sudah mepet sehingga tidak sempat dilakukan perbaikan," ungkapnya.

Sementara, Kasi Penkum Kejati Babel Roy Arlan menerangkan, pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan hasil temuan tersebut. Selama pejabat yang bersangkutan

dapat menindaklanjuti LHP dengan kurun waktu 2 bulan atau 60 hari. "Kalau baru diterima artinya ada rentan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nanti akan ada tim penagihannya," ujarnya.

Dirinya menambahkan jika selama rentan waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi atau ditindaklanjuti, maka baru bisa aparat penegak hukum bertindak. "Selama 60 hari ini pihak yang bersangkutan tidak juga menyelesaikan temuan ini. Maka baru bisa aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap temuan tersebut," tambahnya. Ia pun mengakui jika penyidik Kejati sempat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Porwil. Yaitu pengadaan mobil untuk pelaksanaan Porwil namun ternyata digunakan oleh anggota dewan.

"Kita memang sempat memeriksa masalah pengadaan mobil tapi itu juga baru sebatas Sprintug dan masih mengambang," ungkapnya. Dijelaskan dalam permasalahan pengadaan mobil tersebut hanya sebatas peruntukannya saja yang kurang tepat. Sehingga Kejati menyarankan Pemprov Babel untuk menarik kembali unit mobil tersebut. "Peruntukannya saja yang kurang tepat sehingga kami menyarankan kepada Pemprov untuk segera menarik kembali mobil tersebut," pungkasnya. (cr1/cr2)

dari Halaman 1